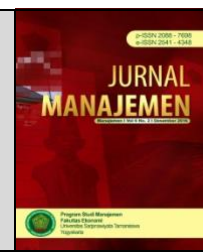




JURNAL MANAJEMEN

Terbit online : <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id>



Kompleksitas Daerah, Pengawasan Internal dan Dampaknya terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Indonesia

Muhtar

Universitas Sebelas Maret

E-mail : Muhtar66@staff.uns.ac.id

Abstrak

Informasi Naskah :

Diterima:

25 Juli 2022

Revisi :

27 Juli 2022

Tersedia Online :

28 Juli 2022

Keywords: Indonesia, local government, timeliness of financial reporting, complexity, internal control

This study aims to examine the effect of the complexity of local government and local government internal control on the timeliness of local government financial reporting in Indonesia. This study produces panel data with a total of 1524 observations from 508 local governments in Indonesia. Data analysis was performed by panel data regression. This study found that there were still local governments in Indonesia during the 2016-2018 period that had not been able to submit their financial reports on time with an average delay of 2 days from the specified reporting deadline. Furthermore, the empirical findings of this study reveal that the complexity of local government does not affect the timeliness of local government financial reporting, while internal control shows a positive influence. This study also recommends local governments to continuously improve the quality of internal control to be more effective and efficient in order to oversee the local government financial reporting process so that it can be completed on time.

Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan salah satu mekanisme akuntabilitas terpenting baik di sektor privat maupun sektor publik (Blanco et al., 2011; Steccolini, 2004; Yusuf & Jordan, 2015). Dalam organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, laporan keuangan menjadi salah satu alat akuntabilitas yang sangat krusial (Yusuf & Jordan, 2015) untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah mengelola dana publik dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Adiputra et al., 2018), utamanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan adalah ketepatan waktu yang penting untuk meningkatkan kapasitas informasi keuangan sebagai masukan untuk penilaian akuntabilitas dan menentukan keputusan pengguna informasi tersebut (Tambingon et al., 2018). Aspek ketepatan waktu informasi keuangan memang merupakan hal yang penting pada sektor pemerintahan

(Edmonds et al., 2017). Di Indonesia, ketepatan waktu laporan keuangan lembaga pemerintah sangat diatur oleh Undang-Undang¹. Regulasi yang berlaku mengatur bahwa lembaga pemerintah di Indonesia wajib menyerahkan laporan keuangan *unaudited* kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya setelah periode pelaporan. Namun, masih terdapat beberapa instansi pemerintah di Indonesia yang belum mampu memenuhi tenggat waktu pelaporan keuangan yang diatur oleh regulasi, terutama instansi pemerintah daerah (Sutaryo et al., 2020a).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan telah menjadi isu pada pemerintah daerah di Indonesia sejak diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada organisasi pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah telah mengamanatkan implementasi akuntansi berbasis akrual sebagai bagian dari reformasi akuntansi sektor publik untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dalam laporan keuangan lembaga pemerintah dan meningkatkan transparansi (Karunia et al., 2019; Pamungkas, 2018; Putra & Sulistyowati, 2021). Namun, pemerintah daerah Indonesia masih memiliki kendala dalam penerapan akuntansi akrual seperti kurangnya tenaga ahli yang kompeten di bidang akuntansi (McLeod & Harun, 2014; Suparman et al., 2015) dan terbatasnya penerapan teknologi informasi yang terintegrasi secara efektif dan efisien dalam proses pelaporan keuangan (Suparman et al., 2015). Kesulitan-kesulitan tersebut berdampak signifikan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris yang memadai terkait pengaruh kompleksitas dan kapabilitas fungsi audit internal pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Studi ini menyajikan kontribusi literatur dengan mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya seperti pembatasan ruang lingkup penelitian dengan mencakup semua pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Adapun struktur penulisan artikel untuk bagian selanjutnya disajikan sebagai berikut: kajian pustaka dan pengembangan hipotesis; metodologi; hasil dan pembahasan; dan penutup.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Hubungan Keagenan dan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban agen untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Halim & Abdullah (2006) mengungkapkan bahwa teori keagenan juga berlaku dalam konteks pemerintah daerah dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen masyarakat yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat. Dalam teori keagenan, agen dianggap cenderung memaksimumkan kepentingannya tetapi tetap berusaha memenuhi kontrak (Mäntysaari, 2010) dengan potensi agen bertindak menyimpang untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, suatu mekanisme tata kelola yang baik diterapkan, salah satunya dengan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh fungsi audit internal (Sutaryo et al., 2022a).

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tepat waktu merupakan salah satu karakteristik informasi laporan keuangan yang sangat penting untuk dipenuhi. Ketepatan waktu merupakan karakteristik yang penting untuk mendukung relevansi informasi keuangan (Ashraf et al., 2019). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa pemerintah daerah harus menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) paling lambat tiga bulan setelah periode pelaporan berakhir, tepatnya pada 31 Maret pada tahun setelah periode pelaporan.

Kompleksitas Daerah dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat kompleksitas suatu pemerintah daerah berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai konsekuensi dari pembagian fungsi pemerintahan ke sejumlah SKPD, setiap SKPD diwajibkan menyusun laporan keuangan masing-masing untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPD sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian, kompleksitas akan mempengaruhi waktu penyusunan LKPD secara keseluruhan karena penyusunan di masing-masing SKPD dan proses konsolidasi dari banyaknya SKPD juga memakan lebih banyak waktu (Sutaryo et al., 2020b). Merujuk pada referensi yang tersedia pada literatur dan regulasi terkait, hipotesis penelitian berikut dirumuskan:

H2. Kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pengawasan Internal dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan internal pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan (Aikins, 2011). Pengawasan internal mendukung pengelolaan keuangan khususnya dalam melaksanakan proses keuangan yang efektif (Van Rensburg & Coetzee, 2016). Pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah Indonesia dilakukan oleh fungsi audit internal melalui inspektorat daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan daerah yang akuntabel yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh regulasi perundang-undangan yang ditetapkan (Sarjono & Sulistiadi, 2018).

Fungsi audit internal melaksanakan berbagai kegiatan audit, revidu, hingga evaluasi dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Sari et al., 2019). Kapabilitas fungsi audit internal yang memadai dapat mendukung tata kelola yang baik (Ayagre, 2015). Fungsi audit internal membantu memastikan efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan program-program pemerintah dari sisi keuangan (Sarens et al., 2011). Dengan pengawasan internal yang optimal, Dengan demikian, kapabilitas fungsi audit internal diharapkan mampu meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Metodologi

Desain dan Cakupan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang mengkaji pengaruh kompleksitas daerah serta pengawasan internal terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2018 yang terdiri dari 508 pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian ini tidak mencakup Kota Administratif yang berada dalam Provinsi DKI Jakarta karena tidak menerbitkan laporan keuangan auditan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Proses pemilihan sampel dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
- b) Pemerintah daerah menyediakan laporan keuangan audit yang dapat diakses; dan
- c) Pemerintah daerah menyediakan informasi yang dapat diakses yang dibutuhkan untuk data penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait pemerintah daerah Indonesia dari tahun anggaran 2016-2018. Dengan demikian, bentuk data penelitian ini adalah data panel. Data penelitian ini diperoleh dari lembaga negara yang berwenang, yaitu BPK, BPKP, dan halaman web pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan time lag penyampaian laporan keuangan yang diperoleh dari BPK. Variabel independen terdiri dari kompleksitas pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah SKPD serta pengawasan internal pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat kapabilitas fungsi audit internal. Selain variabel independen, beberapa variabel kontrol juga digunakan untuk mengakomodasi pengaruh di luar variabel independen yang terdiri dari kompetisi politik, tingkat pembangunan daerah, serta faktor keuangan daerah yang terdiri dari aset, pendapatan, dan belanja daerah. Operasionalisasi variabel penelitian secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Pengukuran	Referensi Pengukuran
<u>Dependen</u>		
Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (TIMELINESS _{it})	Time lag pelaporan keuangan, diukur dengan tanggal penyampaian laporan keuangan dikurangi dengan batas tanggal penyampaian laporan keuangan yang diatur	Cohen & Leventis (2013), Sutaryo et al. (2022b)
<u>Independen</u>		
Kompleksitas pemerintah daerah (COMPLEX _{it})	Jumlah SKPD	Muhtar et al. (2021), Sutaryo & Sinaga (2018), Winarna et al. (2021).
Pengawasan Internal pemerintah daerah (IAF _{it})	Tingkat kapabilitas fungsi audit internal yang diukur dengan level	Sari et al. (2019), Sutaryo et al. (2020b), Yusof et al. (2018)

Variabel	Pengukuran	Referensi Pengukuran
	<i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM): Level 1 = Rintisan Level 2 = Infrastruktur Level 3 = Terintegrasi Level 4 = Terkelola Level 5 = Optimal	
Kontrol		
Kompetisi politik (POLOPP _{it})	Proporsi anggota dewan dari partai oposisi pada DPRD	Cohen & Leventis (2013b)
Tingkat pembangunan daerah (IPM _{it})	Indeks Pembangunan Manusia tingkat daerah	Fadilah et al. (2018), Miranda-Lescano et al. (2022), Prasetyo & Zuhdi (2013), Saragih (2022)
Aset daerah (ASSET _{it})	Nilai logaritma natural total aset daerah	Adiputra et al. (2018), Utama et al., (2019)
Pendapatan daerah (REV _{it})	Nilai logaritma natural total pendapatan daerah	Adiputra et al. (2018), Utama et al., (2019)
Belanja daerah (EXPEND _{it})	Nilai logaritma natural total belanja daerah	Adiputra et al. (2018), Utama et al., (2019)

Analisis Data

Proses analisis data penelitian didahului dengan analisis statistik deskriptif dan korelasi variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh kompleksitas dan pengawasan internal pemerintah daerah sebagai variabel independen terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan selaku variabel dependen. Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

$$TIMELINESS = a + bCOMPLEX_{it} + bIAF_{it} + bASSET_{it} + bREV_{it} + bEXPEND_{it} + bGEO_{it} + bKABKOTA_{it} + e.....(1)$$

Hasil Analisis dan Pembahasan

Statistik Deskriptif dan Korelasi Variabel

Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil analisis statistik deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
TIMELINESS _{it}	1524	-2,601	17,944	-130	73
COMPLEX _{it}	1524	51,55	20,876	22	209
IAF _{it}	1514	1,836	0,657	1	3
POLOPP _{it}	1524	0,627	0,198	0,04	1
IPM _{it}	1524	66,409	7,352	21,12	86,11
ASET _{it}	1524	28,493	0,616	26,44	31,387
REV _{it}	1524	27,889	0,503	24,484	29,732
EXPEND _{it}	1524	27,767	0,496	25,596	29,73

Adapun terkait variabel kontrol, rata-rata variabel kompetisi politik adalah 0,627 yang berarti bahwa presentase oposisi pada DPRD pemerintah daerah mencapai 62,7%. Selanjutnya, variabel pembangunan daerah sebagaimana diukur dengan nilai IPM menunjukkan rata-rata 66,409 yang artinya masih pada tingkat menengah. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji korelasi antar variabel dengan hasil yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil analisis korelasi

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) TIMELINESS _{it}	1,000							
(2) COMPLEX _{it}	-0,001	1,000						
(3) IAF _{it}	0,213	0,087	1,000					
(4) POLOPP _{it}	-0,102	-0,045	-0,121	1,000				
(5) IPM _{it}	0,264	0,012	0,228	0,011	1,000			
(6) ASET _{it}	0,205	0,153	0,180	-0,165	0,345	1,000		
(7) REV _{it}	0,185	0,228	0,196	-0,173	0,231	0,787	1,000	
(8) EXPEND _{it}	0,203	0,227	0,217	-0,180	0,299	0,822	0,941	1,000

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompleksitas pemerintah daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pengawasan internal menunjukkan pengaruh positif. Hasil tersebut menolak hipotesis 1 dan menerima hipotesis 2. Temuan dari analisis regresi data panel berikut dengan analisis subsampel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil analisis regresi data panel

Variabel	Semua Pemda	Pemda Kabupaten	Pemda Kota
COMPLEX _{it}	0,0318 (0,0332)	0,0373 (0,0342)	-0,0128 (0,124)
IAF _{it}	4,716*** (1,044)	3,871*** (1,185)	7,217*** (2,303)
POLOPP _{it}	-3,142 (3,692)	-3,036 (4,083)	-4,292 (8,824)
IPM _{it}	0,697 (0,566)	0,765 (0,597)	0,484 (1,730)
ASET _{it}	15,39*** (3,047)	18,18*** (3,604)	9,502 (6,307)
REV _{it}	-0,719 (2,918)	-0,369 (3,010)	-4,967 (11,31)
EXPEND _{it}	-12,21*** (3,674)	-15,21*** (4,425)	-6,525 (8,637)
Constant	-136,4 (115,5)	-144,4 (128,2)	0,676 (295,3)
Observasi	1514	1236	278

Variabel	Semua Pemda	Pemda Kabupaten	Pemda Kota
<i>R-squared</i>	0,10	0,95	0,032
<i>F-Statistics</i>	9,61	7,36	2,65
<i>Prob.</i>	0,000	0,000	0,012
Jumlah Pemda	508	415	93
Estimasi terbaik	<i>Fixed effect</i>	<i>Fixed effect</i>	<i>Fixed effect</i>

*** signifikan pada taraf 0,01; ** signifikan pada taraf 0,05; * signifikan pada taraf 0,1

Kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah didukung dengan temuan yang konsisten pada skenario observasi pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, tingkat kompleksitas pemerintah daerah tidak menentukan kecenderungan apakah pemerintah daerah mampu menyampaikan LKPD secara tepat waktu atau tidak. Terkait dengan temuan ini, beberapa penelitian terdahulu tidak menemukan pengaruh signifikan dari variabel kompleksitas pemerintah daerah terhadap beberapa aspek terkait pelaporan keuangan. Setyaningrum & Syafitri (2012) tidak menemukan pengaruh signifikan dari kompleksitas pemerintah daerah terhadap kualitas pengungkapan. Pemerintah daerah tetap mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu.

Kapabilitas fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Analisis subsampel lebih lanjut menunjukkan pengaruh yang konsisten pada semua skenario observasi baik pada semua pemerintah daerah, subsampel kabupaten, dan juga kota. Kapabilitas fungsi audit internal yang dikembangkan dengan konsep IACM sendiri bertujuan untuk meningkatkan peran fungsi audit internal dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik (Institute of Internal Auditors, 2009). Peningkatan kapabilitas memperkuat dan mendukung efektivitas pengendalian internal untuk proses pengelolaan keuangan yang lebih baik (Yusof et al., 2018). Van Rensburg & Coetzee (2016) menyebutkan bahwa kapabilitas fungsi audit internal mampu mendukung pemerintah dalam menghasilkan luaran yang ditargetkan, salah satunya yaitu menghasilkan laporan keuangan yang andal. Temuan ini juga mendukung beberapa penelitian terdahulu.

Terkait dengan variabel kontrol, penelitian ini menemukan bahwa aset daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dengan kekayaan yang lebih besar cenderung mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena didukung kekayaan daerahnya yang besar. Adapun belanja daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan transaksi yang melibatkan proses yang lebih rumit dan memakan waktu terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban sehingga penatausahaan belanja yang belum selesai dapat menunda proses pelaporan keuangan. Variabel kontrol lain yaitu pendapatan daerah, kompetisi politik dan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penutup

Penelitian ini menguji pengaruh kompleksitas pemerintah daerah dan pengawasan internal terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui kajian yang menyeluruh mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2016-2018 yang belum mampu menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu dengan rata-rata keterlambatan 2 hari dari batas waktu pelaporan yang ditentukan. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan sedangkan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini menekankan pentingnya menangani isu kompleksitas pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan melalui implementasi teknologi informasi yang memadai dalam proses pelaporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan untuk mendukung proses pelaporan keuangan yang lebih baik dan tepat waktu. Penelitian ini juga merekomendasikan pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas fungsi internal audit untuk pengawasan internal yang lebih efektif dan efisien guna mengawal proses pelaporan keuangan pemerintah daerah agar tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Abdillah, W., & Saepullah, A. (2018). Model Technology to Performance Chain (TPC) in Implementing Accrual-Based Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Finance: Empirical Evidence from Local Government of Indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 9(1), 56–68. <https://doi.org/10.15294/jdm.v9i1.14652>
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019>
- Aikins, S. K. (2011). An examination of government internal audits' role in improving financial performance. *Public Finance and Management*, 11(4), 306–337. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/17506200710779521>
- Arifin, T., Trinugroho, I., Prabowo, M. A., Sutaryo, S., & Muhtar, M. (2015). Local governance and corruption: Evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 12(4CONT1), 194–199. <https://doi.org/10.22495/cocv12i4c1p3>
- Ashraf, M., Michas, P. N., & Russomanno, D. (2019). The Impact of Audit Committee Information Technology Expertise on the Reliability and Timeliness of Financial Reporting. *The Accounting Review*, *In press*. <https://doi.org/10.2308/accr-52622>
- Ayagre, P. (2015). Internal Audit Capacity to Enhance Good Governance of Public Sector Organisations : Developing Countries Perspective. *Journal of Governance and Development*, 11(1), 39–60.
- Bimo, I. D., Siregar, S. V., Hermawan, A. A., & Wardhani, R. (2019). Internal control over financial reporting, organizational complexity, and financial reporting quality. *International Journal of Economics and Management*, 13(2), 331–342.
- Blanco, H., Lennard, J., & Lamontagne, S. (2011). Annual reporting and accountability by municipalities in Canada: An empirical investigation. *Accounting Perspectives*, 10(3), 195–224. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3838.2011.00024.x>

- Cagle, C., Flesher, D., Pridgen, A., & Bunker, R. (2017). Compilation report timeliness in local governments: An investigation of entities exceeding state deadlines. *Journal of Accounting and Finance*, 17(6), 43–58.
- Christofzik, D. I., & Kessing, S. G. (2018). Does fiscal oversight matter? *Journal of Urban Economics*, 105, 70–87. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2018.03.002>
- Cohen, S., & Leventis, S. (2013a). Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay. *Accounting Forum*, 37(1), 40–53. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.04.002>
- Cohen, S., & Leventis, S. (2013b). Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay. *Accounting Forum*, 37(1), 40–53. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.04.002>
- DeSimone, S., D’Onza, G. D., & Sarens, G. (2019). *Correlates of internal audit function maturity* (Vol. 1, Issue July).
- Edmonds, C. T., Edmonds, J. E., Vermeer, B. Y., & Vermeer, T. E. (2017). Does timeliness of financial information matter in the governmental sector? *Journal of Accounting and Public Policy*, 36(2), 163–176. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.002>
- Ewens, H., & van der Voet, J. (2019). Organizational complexity and participatory innovation: participatory budgeting in local government. *Public Management Review*, 21(12), 1848–1866. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1577908>
- Fadilah, A., Ananda, C. F., & Kaluge, D. (2018). A Panel Approach: How Does Government Expenditure Influence Human Development Index? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(2). <https://doi.org/10.17977/um002v10i22018p130>
- Gamayuni, R. R. (2018a). The effect of internal audit function effectiveness and implementation of accrual based government accounting standard on financial reporting quality. *Review of Integrative Business and Economic Research*, 7(1), 46–58.
- Gamayuni, R. R. (2018b). The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 11(3), 248–261. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2018.093951>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan masalah keagenan di pemerintah daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Srimindarti, C., & Oktaviani, R. M. (2019). Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional financial statements? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(2), 106–116. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art5>
- Harun, H., Mir, M., Carter, D., & An, Y. (2019). Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia. *Public Money and Management*, 39(2), 86–94. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580892>
- Institute of Internal Auditors. (2009). *Internal audit capability model for the public sector* (Issue January). <https://na.theiia.org/iiarf/Public Documents/Internal Audit Capability Model IA-CM for the Public Sector Overview.pdf>
- Janse van Rensburg, J. O., & Coetzee, P. (2016). Internal audit public sector capability: A case study. *Journal of Public Affairs*, 16(2), 181–191. <https://doi.org/10.1002/pa.1574>
- Karunia, A. P., Payamta, P., & Sutaryo, S. (2019). The Implementation of Accrual-based Accounting in Indonesian Government: Has Local Government Financial Statement Quality Improved? *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 26–43. <https://doi.org/10.18196/jai.2002115>

- Kewo, C. L., & Afifah, N. N. (2017). Does quality of financial statement affected by internal control system and internal audit? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 568–573.
- Leon-Moreta, A. (2018). Functional Responsibilities of Municipal Governments. *American Review of Public Administration*, 48(1), 18–32. <https://doi.org/10.1177/0275074016675721>
- Mäntysaari, P. (2010). The law of corporate finance: General principles and EU Law (Volume I). In *Springer Berlin Heidelberg*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-02750-5>
- Mcleod, R. H., & Harun, H. (2014). Public Sector Accounting Reform at Local Government Level in Indonesia. *Financial Accountability & Management*, 30(2), 267–4424.
- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2022). Human development and decentralization: The importance of public health expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 1–29. <https://doi.org/10.1111/apce.12373>
- Muhtar, Arifin, T., & Sutaryo. (2021). Performance accountability in Indonesian local governments: Does monitoring really work? *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1673–1692. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4329.2021>
- Muhtar, M., Payamta, P., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2020). Government accrual-based accounting standards implementation in Indonesia: The role of local government internal audit. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 28(3). <https://doi.org/10.46585/sp28031107>
- Pamungkas, B. (2018). Accrual-Based Accounting Implementation In Indonesian's Local Governments Compared To Other Countries' Experiences. *Man in India*, 98(1), 1–23.
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance*, 5, 615–622. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00072-5)
- Putra, D. M., & Sulistyowati, W. A. (2021). Measuring Impact of the Accrual Accounting Implementation on Fiscal Transparency Quality: A Mix Method Study in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3), 460–481. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.11441>
- Rahman, A., & Fachri, Z. (2016). Region's Financial Accounting Information System and the Quality of Local Government Financial Reports. *Information Management and Business Review*, 8(4), 64–68. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahmatika, D. N. (2014). The impact of internal audit function effectiveness on quality of financial reporting and its implications on good government governance research on local government Indonesia. *Research Journal of Finance Accounting*, 5(18), 64–75.
- Saragih, J. (2022). Local Government Capital Expenditure, Internal Supervision, Wealth and Human Development: Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 89–106. <https://doi.org/10.24815/JDAB.V9I1.23562>
- Sarens, G., Allegrini, M., D'Onza, G., & Melville, R. (2011). Are internal auditing practices related to the age of the internal audit function?: Exploratory evidence and directions for future research. *Managerial Auditing Journal*, 26(1), 51–64. <https://doi.org/10.1108/02686901111090835>
- Sari, R. P., Hastuti, S., & Tannar, O. (2019). Audit quality based on Internal Audit Capability Model (IACM) and gender as mediating variable in the public sector. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 2(1), 22–38. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v2i1.61>
- Sarjono, A. H., & Sulistiadi, W. (2018). Analysis of policy implementation for the improvement capability of internal government supervisory apparatus (APIP) at inspectorate general of

- ministry of health. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.7454/ihpa.v3i1.2104>
- Sepsey, T. (2011). Internal Audits at Local Governments: Audit Experiences of the State Audit Office of Hungary. *Public Finance Quarterly*, 56(4), 411–428.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Smidt, L., Ahmi, A., Steenkamp, L., van der Nest, D. P., & Lubbe, D. (2019). A Maturity-level Assessment of Generalised Audit Software: Internal Audit Functions in Australia. *Australian Accounting Review*, 29(3), 516–531. <https://doi.org/10.1111/auar.12252>
- Steccolini, I. (2004). Is the annual report an accountability medium? An empirical investigation into Italian local governments. *Financial Accountability & Management*, 20(3), 327–350.
- Suparman, M., Siti-Nabiha, A. K., & Phua, L. K. (2015). Public sector accounting reforms: Assessing Indonesia's readiness towards implementing accrual accounting. *Problems and Perspectives in Management*, 13(2), 296–303.
- Sutaryo, Naviantia, I. A., & Muhtar. (2020a). Audit opinion on government financial report: Evidence from local governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129–144.
- Sutaryo, S., Naviantia, I. A., & Muhtar, M. (2020b). Audit Opinion on Government Financial Report: Evidence from Local Governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129–144. <http://www.ijem.upm.edu.my>
- Sutaryo, S., Sahari, S. binti, Jakpar, S. bin, & Balia, S. S. bin. (2022a). Internal Audit Function And Public Service Quality: Evidence From Indonesian Local Governments. *Public Administration Issues*, 0(5), 110–133. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-5-110-133>
- Sutaryo, S., Sahari, S., Jakpar, S., & Balia, S. S. (2022b). Timeliness of Local Government Budgeting in Indonesia: Do Internal Audit Function and Political Factors Matter? *International Journal of Economics and Management*, 16(1), 65–81. <http://www.ijem.upm.edu.my>
- Sutaryo, S., & Sinaga, D. (2018). Government internal control system maturity: The role of internal guidance and external control of local government in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 24–35. <https://doi.org/10.18196/jai.190189>
- Tambingon, H. N., Yadiati, W., & Kewo, C. L. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues Determinant Factors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(2), 262–268. <http://www.econjournals.com>
- Utama, F. R., Evana, E., & Gamayuni, R. R. (2019). The effect of local government characteristics on performance of local government administration. *International Research Journal of Business Studies*, 12(2), 197–208. <https://doi.org/10.21632/irjbs.12.2.197-208>
- Winarna, J., Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2021). Government Internal Control System and Local Government Administration Performance: Evidence from Indonesian Local Governments. *Public Finance Quarterly*, 66(2), 88–107. https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_S_2_5
- Yuesti, A., Adnyana, I. M. D., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). Management information systems and the quality of financial statements in local government. *Journal of Public Affairs*, 1–7. <https://doi.org/10.1002/pa.2462>

- Yusof, N. A. Z. M., Haron, H., & Ismail, I. (2018). Internal Audit Capability Level: Case Studies of State, State Statutory Body and Public University Organizations in Malaysia. *International Academic Journal of Accounting and Financial Management*, 05(02), 110–130. <https://doi.org/10.9756/iajafm/v5i2/1810021>
- Yusuf, J.-E., & Jordan, M. M. (2015). Popular Financial Reports: Tools for Transparency, Accountability and Citizen Engagement Repository Citation. *The Journal of Government Financial Management*, 64(1), 12–17. www.electionstudies.org
- Zeyn, E. (2018). The Effect of Internal Audit Quality on Financial Accountability Quality at Local Government. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 4(2), 74–82. <https://doi.org/10.20448/2002.42.74.82>